



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi ADD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Camat adalah Pemimpin dan Kordinator Penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN

Pasal 2

ADD diberikan dengan maksud untuk memberikan pembiayaan program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. keadaan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD antara lain:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;

- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan dan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pengalokasian ADD;
- b. pembagian ADD;
- c. penyaluran ADD;
- d. penggunaan ADD; dan
- e. pelaporan

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemeritah Daerah mengalokasikan 10% (sepuluh perseratus) DAU dan DBH yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 yang berasal dari transfer ke Daerah yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dana Desa.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh jenis DBH selain:
 - a. DBH cukai hasil tembakau;
 - b. DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi;
 - c. tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;
 - d. DBH perkebunan sawit; dan
 - e. DBH lainnya yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang diklasifikasikan ke dalam kelompok transfer

BAB III PEMBAGIAN ADD

Bagian Kesatu Jumlah ADD yang Dianggarkan dalam APBD

Pasal 6

ADD yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp43.796.532.800 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Bagian Kedua Rincian Pembagian ADD Per Desa

Pasal 7

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi ke setiap Desa dengan memperhatikan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. jumlah penduduk;
- c. angka kemiskinan;
- d. luas wilayah; dan
- e. tingkat kesulitan geografis.

Pasal 8

- (1) Pembagian pagu ADD dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (2) Formulasi pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.

Pasal 9

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, bobot sebesar 98% (sembilan puluh delapan per seratus) dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, bobot sebesar 2% (dua per seratus) dibagi dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis

Pasal 10

- (1) Daftar Rincian ADD untuk setiap Desa tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.
- (2) Indeks Kesulitan Geografis Desa tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN ADD

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan apabila sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa, setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap.
- (2) Tahap Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh per seratus) pada bulan Maret;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) pada bulan Juli; dan
 - c. tahap III sebesar 30% (tiga puluh per seratus) pada bulan November.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui transfer secara bertahap melalui bank yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD tahap I dilakukan paling lambat minggu keempat Bulan Maret setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. dokumen APBDesa tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya
 - c. bukti setoran pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) desa tahun sebelumnya dan surat Pernyataan Kerja Bakti yang diketahui Camat, Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- (2) Penyaluran ADD tahap II dilakukan paling lambat minggu keempat Bulan Agustus setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
 - b. surat Pernyataan Kerja Bakti yang diketahui Camat, Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- (3) Penyaluran ADD tahap III dilakukan paling lambat minggu keempat November setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahap II yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh per seratus);
 - b. surat Pernyataan Kerja Bakti yang diketahui Camat, Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- (4) Usulan pengajuan penyaluran diterima dan dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (5) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami keterlambatan, penyaluran dilaksanakan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengajukan permohonan transfer dari RKUD ke RKD.
- (2) Pengajuan Permohonan transfer dari RKUD ke RKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah

- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi akhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal :
 - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADD tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD tahap II.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB V
PENGUNAAN ADD
Bagian Kesatu
Pemanfaatan ADD

Pasal 17

ADD digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap Kepala Desa,
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Penghasilan tetap setiap bulan bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - b. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh

per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

- (4) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (5) Badan Permusyawaratan Desa diberikan tunjangan dan biaya operasional.

Pasal 20

Besaran Penghasilan Tetap setiap bulan dan tunjangan, sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana dari ADD.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati Mamasa c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Mei tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan; dan
 - c. tahap III atau Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamasa 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Permusyawaratan Badan Desa dan Standarisasi Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2017 Nomor 244) sebagaimana diubah

dengan Peraturan Bupati Mamasa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Permusyawaratan Desa, Desa Badan dan Standarisasi Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2020 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 09 Maret 2026
BUPATI MAMASA,

ttd

WELEM SAMBOLANGI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 09 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2026 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
Plt. KABAG. HUKUM,



YAUKE SH
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. : 19780120 201101 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN MAMASA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU PER-DESA	PENYALURAN			JUMLAH
						TAHAP I 30%	TAHAP II 40%	TAHAP III 30%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mambi	Rantebulahan	255.479.775	2.772.899	258.253.000	77.475.900	103.301.200	77.475.900,00	258.253.000,00
2		Sondonglayu	255.479.775	2.893.570	258.373.000	77.511.900	103.349.200	77.511.900,00	258.373.000,00
3		Salubanua	255.479.775	5.197.095	260.677.000	78.203.100	104.270.800	78.203.100,00	260.677.000,00
4		Tapalina	255.479.775	3.775.617	259.255.000	77.776.500	103.702.000	77.776.500,00	259.255.000,00
5		Sendana	255.479.775	2.966.216	258.446.000	77.533.800	103.378.400	77.533.800,00	258.446.000,00
6		Pamosean	255.479.775	4.419.236	259.899.000	77.969.700	103.959.600	77.969.700,00	259.899.000,00
7		Selumaka	255.479.775	4.808.821	260.289.000	78.086.700	104.115.600	78.086.700,00	260.289.000,00
8		Bujung Manurung	255.479.775	2.869.413	258.349.000	77.504.700	103.339.600	77.504.700,00	258.349.000,00
9		Salu Alo	255.479.775	3.769.549	259.249.000	77.774.700	103.699.600	77.774.700,00	259.249.000,00
10		Indobanua	255.479.775	3.471.825	258.952.000	77.685.600	103.580.800	77.685.600,00	258.952.000,00
11		Saludurian	255.479.775	3.710.972	259.191.000	77.757.300	103.676.400	77.757.300,00	259.191.000,00
12	Aralle	Ralle Anak	255.479.775	2.707.446	258.187.000	77.456.100	103.274.800	77.456.100,00	258.187.000,00
13		Panetean	255.479.775	4.385.330	259.865.000	77.959.500	103.946.000	77.959.500,00	259.865.000,00
14		Uhailanu	255.479.775	5.215.842	260.696.000	78.208.800	104.278.400	78.208.800,00	260.696.000,00
15		Aralle Utara	255.479.775	4.333.266	259.813.000	77.943.900	103.925.200	77.943.900,00	259.813.000,00
16		Uhaidaho	255.479.775	3.756.465	259.236.000	77.770.800	103.694.400	77.770.800,00	259.236.000,00
17		Baruru	255.479.775	6.512.365	261.992.000	78.597.600	104.796.800	78.597.600,00	261.992.000,00
18		Ralleanak Utara	255.479.775	2.681.923	258.162.000	77.448.600	103.264.800	77.448.600,00	258.162.000,00
19		Pamoseang Pangga	255.479.775	3.117.135	258.597.000	77.579.100	103.438.800	77.579.100,00	258.597.000,00
20		Kalabe	255.479.775	3.985.057	259.465.000	77.839.500	103.786.000	77.839.500,00	259.465.000,00
21		Aralle Selatan	255.479.775	3.003.130	258.483.000	77.544.900	103.393.200	77.544.900,00	258.483.000,00
22		Hahangan	255.479.775	3.332.667	258.812.000	77.643.600	103.524.800	77.643.600,00	258.812.000,00

23	Mamasa	Rambusaratu	255.479.775	8.343.570	263.823.000	79.146.900	105.529.200	79.146.900,00	263.823.000,00
24		Osango	255.479.775	6.209.636	261.689.000	78.506.700	104.675.600	78.506.700,00	261.689.000,00
25		Lambanan	255.479.775	10.683.518	266.163.000	79.848.900	106.465.200	79.848.900,00	266.163.000,00
26		Lembana Salulo	255.479.775	3.772.420	259.252.000	77.775.600	103.700.800	77.775.600,00	259.252.000,00
27		Taupe	255.479.775	8.036.980	263.517.000	79.055.100	105.406.800	79.055.100,00	263.517.000,00
28		Buntu Buda	255.479.775	5.551.940	261.032.000	78.309.600	104.412.800	78.309.600,00	261.032.000,00
29		Tondok Bakaru	255.479.775	8.133.565	263.613.000	79.083.900	105.445.200	79.083.900,00	263.613.000,00
30		Pebassian	255.479.775	6.395.306	261.875.000	78.562.500	104.750.000	78.562.500,00	261.875.000,00
31		Mambuliling	255.479.775	4.362.085	259.842.000	77.952.600	103.936.800	77.952.600,00	259.842.000,00
32		Bombong Lambe	255.479.775	4.488.301	259.968.000	77.990.400	103.987.200	77.990.400,00	259.968.000,00
33		Bubun Batu	255.479.775	4.210.008	259.690.000	77.907.000	103.876.000	77.907.000,00	259.690.000,00
34	Pana	Manipi	255.479.775	11.138.356	266.618.000	79.985.400	106.647.200	79.985.400,00	266.618.000,00
35		Mamullu	255.479.775	7.718.845	263.199.000	78.959.700	105.279.600	78.959.700,00	263.199.000,00
36		Sapan	255.479.775	5.412.445	260.892.000	78.267.600	104.356.800	78.267.600,00	260.892.000,00
37		Datubaringan	255.479.775	10.542.024	266.022.000	79.806.600	106.408.800	79.806.600,00	266.022.000,00
38		Panura	255.479.775	9.843.065	265.323.000	79.596.900	106.129.200	79.596.900,00	265.323.000,00
39		Tallang Bulawan	255.479.775	7.693.973	263.174.000	78.952.200	105.269.600	78.952.200,00	263.174.000,00
40		Karaka	255.479.775	6.371.744	261.852.000	78.555.600	104.740.800	78.555.600,00	261.852.000,00
41		Ulusalu	255.479.775	7.266.420	262.746.000	78.823.800	105.098.400	78.823.800,00	262.746.000,00
42		Weri	255.479.775	4.717.318	260.197.000	78.059.100	104.078.800	78.059.100,00	260.197.000,00
43		Salutambun	255.479.775	5.754.406	261.234.000	78.370.200	104.493.600	78.370.200,00	261.234.000,00
44		Saloan	255.479.775	8.734.732	264.215.000	79.264.500	105.686.000	79.264.500,00	264.215.000,00
45		Ulusalu Indah	255.479.775	7.758.953	263.239.000	78.971.700	105.295.600	78.971.700,00	263.239.000,00
46	Tabulahan	Periangan	255.479.775	6.186.990	261.667.000	78.500.100	104.666.800	78.500.100,00	261.667.000,00
47		Malatiro	255.479.775	6.629.870	262.109.400	78.632.820	104.843.760	78.632.820,00	262.109.400,00
48		Tabulahan	255.479.775	6.025.567	261.505.000	78.451.500	104.602.000	78.451.500,00	261.505.000,00
49		Saluleang	255.479.775	7.056.062	262.536.000	78.760.800	105.014.400	78.760.800,00	262.536.000,00
50		Tampak Kurra	255.479.775	5.117.371	260.597.000	78.179.100	104.238.800	78.179.100,00	260.597.000,00
51		Gandang Dewata	255.479.775	5.059.367	260.539.000	78.161.700	104.215.600	78.161.700,00	260.539.000,00
52		Burana	255.479.775	7.041.405	262.521.000	78.756.300	105.008.400	78.756.300,00	262.521.000,00
53		Salubakka	255.479.775	5.476.284	260.956.000	78.286.800	104.382.400	78.286.800,00	260.956.000,00
54		Pangandaran	255.479.775	7.076.072	262.556.000	78.766.800	105.022.400	78.766.800,00	262.556.000,00
55		Talopak	255.479.775	4.328.806	259.809.000	77.942.700	103.923.600	77.942.700,00	259.809.000,00
56		Peu'	255.479.775	6.664.963	262.145.000	78.643.500	104.858.000	78.643.500,00	262.145.000,00
57		Timoro	255.479.775	2.940.182	258.420.000	77.526.000	103.368.000	77.526.000,00	258.420.000,00

58		Lakahang Utama	255.479.775	5.796.176	261.276.000	78.382.800	104.510.400	78.382.800,00	261.276.000,00
59	Sumarorong	Batang Uru	255.479.775	5.369.750	260.850.000	78.255.000	104.340.000	78.255.000,00	260.850.000,00
60		Sasakan	255.479.775	5.772.186	261.252.000	78.375.600	104.500.800	78.375.600,00	261.252.000,00
61		Tadisi	255.479.775	4.904.991	260.385.000	78.115.500	104.154.000	78.115.500,00	260.385.000,00
62		Sibanawa	255.479.775	6.450.901	261.931.000	78.579.300	104.772.400	78.579.300,00	261.931.000,00
63		Batangnguru Timur	255.479.775	6.030.925	261.511.000	78.453.300	104.604.400	78.453.300,00	261.511.000,00
64		Salubalo	255.479.775	5.599.731	261.080.000	78.324.000	104.432.000	78.324.000,00	261.080.000,00
65		Banea	255.479.775	5.464.371	260.944.000	78.283.200	104.377.600	78.283.200,00	260.944.000,00
66		Rante Kamase	255.479.775	4.717.597	260.197.000	78.059.100	104.078.800	78.059.100,00	260.197.000,00
67	Messawa	Rippung	255.479.775	7.631.446	263.111.000	78.933.300	105.244.400	78.933.300,00	263.111.000,00
68		Makuang	255.479.775	4.505.529	259.985.000	77.995.500	103.994.000	77.995.500,00	259.985.000,00
69		Sepang	255.479.775	5.172.436	260.652.000	78.195.600	104.260.800	78.195.600,00	260.652.000,00
70		Malimbong	255.479.775	4.056.042	259.536.000	77.860.800	103.814.400	77.860.800,00	259.536.000,00
71		Matande	255.479.775	2.837.455	258.317.000	77.495.100	103.326.800	77.495.100,00	258.317.000,00
72		Sipai	255.479.775	4.526.898	260.007.000	78.002.100	104.002.800	78.002.100,00	260.007.000,00
73		Pasma Mambu	255.479.775	3.299.568	258.779.000	77.633.700	103.511.600	77.633.700,00	258.779.000,00
74		Tanete Batu	255.479.775	3.121.853	258.602.000	77.580.600	103.440.800	77.580.600,00	258.602.000,00
75	Sesenapadang	Orobua	255.479.775	8.560.826	264.041.000	79.212.300	105.616.400	79.212.300,00	264.041.000,00
76		Paladan	255.479.775	5.697.764	261.178.000	78.353.400	104.471.200	78.353.400,00	261.178.000,00
77		Orobua Timur	255.479.775	4.249.206	259.729.000	77.918.700	103.891.600	77.918.700,00	259.729.000,00
78		Rante Puang	255.479.775	5.398.237	260.878.000	78.263.400	104.351.200	78.263.400,00	260.878.000,00
79		Satenetean	255.479.775	4.796.995	260.277.000	78.083.100	104.110.800	78.083.100,00	260.277.000,00
80		Lisuan Ada	255.479.775	5.337.010	260.817.000	78.245.100	104.326.800	78.245.100,00	260.817.000,00
81		Orobua Selatan	255.479.775	4.374.739	259.855.000	77.956.500	103.942.000	77.956.500,00	259.855.000,00
82		Malangkena Padang	255.479.775	4.672.524	260.152.000	78.045.600	104.060.800	78.045.600,00	260.152.000,00
83		Malimbong	255.479.775	3.895.991	259.376.000	77.812.800	103.750.400	77.812.800,00	259.376.000,00
84		Marampan Orobua	255.479.775	6.929.985	262.410.000	78.723.000	104.964.000	78.723.000,00	262.410.000,00
85	Tanduk Kalua	Malabo	255.479.775	3.547.444	259.027.000	77.708.100	103.610.800	77.708.100,00	259.027.000,00
86		Sindagamanik	255.479.775	6.190.603	261.670.000	78.501.000	104.668.000	78.501.000,00	261.670.000,00
87		Parondobulawan	255.479.775	5.175.533	260.655.000	78.196.500	104.262.000	78.196.500,00	260.655.000,00
88		Tamalantik	255.479.775	8.002.618	263.482.000	79.044.600	105.392.800	79.044.600,00	263.482.000,00
89		Mannababa	255.479.775	4.405.852	259.886.000	77.965.800	103.954.400	77.965.800,00	259.886.000,00

90		Mesakada	255.479.775	4.629.196	260.109.000	78.032.700	104.043.600	78.032.700,00	260.109.000,00
91		Ballabatu	255.479.775	5.985.142	261.465.000	78.439.500	104.586.000	78.439.500,00	261.465.000,00
92		Pambe	255.479.775	2.925.659	258.405.000	77.521.500	103.362.000	77.521.500,00	258.405.000,00
93		Salurano	255.479.775	4.009.664	259.489.000	77.846.700	103.795.600	77.846.700,00	259.489.000,00
94		Talimbung	255.479.775	3.924.850	259.405.000	77.821.500	103.762.000	77.821.500,00	259.405.000,00
95		Kanan	255.479.775	6.380.850	261.861.000	78.558.300	104.744.400	78.558.300,00	261.861.000,00
96	Tabang	Tadokalua	255.479.775	9.911.284	265.391.000	79.617.300	106.156.400	79.617.300,00	265.391.000,00
97		Tabang Barat	255.479.775	8.671.398	264.151.000	79.245.300	105.660.400	79.245.300,00	264.151.000,00
98		Masupu	255.479.775	6.187.926	261.668.000	78.500.400	104.667.200	78.500.400,00	261.668.000,00
99		Kalama	255.479.775	7.321.114	262.801.000	78.840.300	105.120.400	78.840.300,00	262.801.000,00
100		Bakadisura	255.479.775	5.228.061	260.708.000	78.212.400	104.283.200	78.212.400,00	260.708.000,00
101		Salukona	255.479.775	9.923.740	265.404.000	79.621.200	106.161.600	79.621.200,00	265.404.000,00
102	Bambang	Mokallang	255.479.775	4.013.079	259.493.000	77.847.900	103.797.200	77.847.900,00	259.493.000,00
103		Masoso	255.479.775	2.809.841	258.290.000	77.487.000	103.316.000	77.487.000,00	258.290.000,00
104		Saluassing	255.479.775	4.482.962	259.963.000	77.988.900	103.985.200	77.988.900,00	259.963.000,00
105		Salubulo	255.479.775	4.966.985	260.447.000	78.134.100	104.178.800	78.134.100,00	260.447.000,00
106		Salukadi	255.479.775	4.460.879	259.941.000	77.982.300	103.976.400	77.982.300,00	259.941.000,00
107		Salukepopok	255.479.775	5.189.726	260.670.000	78.201.000	104.268.000	78.201.000,00	260.670.000,00
108		Ulumambi Barat	255.479.775	5.492.904	260.973.000	78.291.900	104.389.200	78.291.900,00	260.973.000,00
109		Limbadebata	255.479.775	4.840.936	260.321.000	78.096.300	104.128.400	78.096.300,00	260.321.000,00
110		Tanete Tomba	255.479.775	3.458.187	258.938.000	77.681.400	103.575.200	77.681.400,00	258.938.000,00
111		Bambang	255.479.775	5.181.308	260.661.000	78.198.300	104.264.400	78.198.300,00	260.661.000,00
112		Rantelemo	255.479.775	3.057.230	258.537.000	77.561.100	103.414.800	77.561.100,00	258.537.000,00
113		Saludengen	255.479.775	2.876.059	258.356.000	77.506.800	103.342.400	77.506.800,00	258.356.000,00
114		Ulumambi	255.479.775	7.841.507	263.321.000	78.996.300	105.328.400	78.996.300,00	263.321.000,00
115		Bambang Timur	255.479.775	3.851.596	259.331.000	77.799.300	103.732.400	77.799.300,00	259.331.000,00
116		Minanga	255.479.775	4.872.544	260.352.000	78.105.600	104.140.800	78.105.600,00	260.352.000,00
117		Sikamase	255.479.775	6.180.704	261.660.000	78.498.000	104.664.000	78.498.000,00	261.660.000,00
118		Rantetarima	255.479.775	2.809.383	258.289.000	77.486.700	103.315.600	77.486.700,00	258.289.000,00
119		Salururu	255.479.775	2.400.097	257.880.000	77.364.000	103.152.000	77.364.000,00	257.880.000,00
120		Salutabang	255.479.775	3.280.134	258.760.000	77.628.000	103.504.000	77.628.000,00	258.760.000,00
121		Balatana	255.479.775	4.168.682	259.648.000	77.894.400	103.859.200	77.894.400,00	259.648.000,00
122	Balla	Balla	255.479.775	3.916.413	259.396.000	77.818.800	103.758.400	77.818.800,00	259.396.000,00
123		Balla Barat	255.479.775	4.787.001	260.267.000	78.080.100	104.106.800	78.080.100,00	260.267.000,00
124		Balla Sataneatan	255.479.775	6.525.664	262.005.000	78.601.500	104.802.000	78.601.500,00	262.005.000,00

125		Balla Tumuka	255.479.775	5.653.277	261.133.000	78.339.900	104.453.200	78.339.900,00	261.133.000,00
126		Sepakuan	255.479.775	4.960.248	260.440.000	78.132.000	104.176.000	78.132.000,00	260.440.000,00
127		Pidara	255.479.775	4.045.678	259.525.000	77.857.500	103.810.000	77.857.500,00	259.525.000,00
128		Bambapuang	255.479.775	4.172.850	259.653.000	77.895.900	103.861.200	77.895.900,00	259.653.000,00
129		Balla Timur	255.479.775	3.050.690	258.530.000	77.559.000	103.412.000	77.559.000,00	258.530.000,00
130	Nosu	Minanga	255.479.775	3.600.966	259.081.000	77.724.300	103.632.400	77.724.300,00	259.081.000,00
131		Batupapan	255.479.775	6.924.217	262.404.000	78.721.200	104.961.600	78.721.200,00	262.404.000,00
132		Masewwe	255.479.775	4.454.432	259.934.000	77.980.200	103.973.600	77.980.200,00	259.934.000,00
133		Siwi	255.479.775	4.947.258	260.427.000	78.128.100	104.170.800	78.128.100,00	260.427.000,00
134		Minanga Timur	255.479.775	4.284.733	259.765.000	77.929.500	103.906.000	77.929.500,00	259.765.000,00
135		Parinding	255.479.775	3.044.941	258.525.000	77.557.500	103.410.000	77.557.500,00	258.525.000,00
136	Tawalian	Tawalian Timur	255.479.775	14.030.937	269.511.000	80.853.300	107.804.400	80.853.300,00	269.511.000,00
137		Kariango	255.479.775	9.789.870	265.270.000	79.581.000	106.108.000	79.581.000,00	265.270.000,00
138		Rantetangnga	255.479.775	9.002.947	264.483.000	79.344.900	105.793.200	79.344.900,00	264.483.000,00
139	Rantebulahan Timur	Salumokanan	255.479.775	3.981.979	259.462.000	77.838.600	103.784.800	77.838.600,00	259.462.000,00
140		Salumokanan Barat	255.479.775	6.149.450	261.629.000	78.488.700	104.651.600	78.488.700,00	261.629.000,00
141		Buagin	255.479.775	6.337.853	261.818.000	78.545.400	104.727.200	78.545.400,00	261.818.000,00
142		Bambang Buda	255.479.775	5.798.803	261.279.000	78.383.700	104.511.600	78.383.700,00	261.279.000,00
143		Leko	255.479.775	2.674.355	258.154.000	77.446.200	103.261.600	77.446.200,00	258.154.000,00
144		Kirak	255.479.775	5.626.992	261.107.000	78.332.100	104.442.800	78.332.100,00	261.107.000,00
145		Salumokanan Utara	255.479.775	5.467.766	260.948.000	78.284.400	104.379.200	78.284.400,00	260.948.000,00
146		Sampale	255.479.775	3.019.379	258.499.000	77.549.700	103.399.600	77.549.700,00	258.499.000,00
147	Buntumalangka	Buntumalangka	255.479.775	4.734.729	260.215.000	78.064.500	104.086.000	78.064.500,00	260.215.000,00
148		Ranteberan	255.479.775	8.091.388	263.571.000	79.071.300	105.428.400	79.071.300,00	263.571.000,00
149		Kebanga	255.479.775	4.481.477	259.961.000	77.988.300	103.984.400	77.988.300,00	259.961.000,00
150		Salurindu	255.479.775	3.589.789	259.070.000	77.721.000	103.628.000	77.721.000,00	259.070.000,00
151		Taora	255.479.775	3.614.681	259.094.000	77.728.200	103.637.600	77.728.200,00	259.094.000,00
152		Kabae	255.479.775	4.150.459	259.630.000	77.889.000	103.852.000	77.889.000,00	259.630.000,00
153		Salutambun Barat	255.479.775	3.503.582	258.983.000	77.694.900	103.593.200	77.694.900,00	258.983.000,00
154		Penatangan	255.479.775	6.855.192	262.331.400	78.699.420	104.932.560	78.699.420,00	262.331.400,00
155		Salutambun Timur	255.479.775	4.107.271	259.587.000	77.876.100	103.834.800	77.876.100,00	259.587.000,00
156		Salutambun	255.479.775	3.534.603	259.014.000	77.704.200	103.605.600	77.704.200,00	259.014.000,00
157		Aralle Timur	255.479.775	6.646.564	262.126.000	78.637.800	104.850.400	78.637.800,00	262.126.000,00
158	Mehalaan	Mehalaan	255.479.775	3.118.524	258.598.000	77.579.400	103.439.200	77.579.400,00	258.598.000,00
159		Botteng	255.479.775	5.070.429	260.550.000	78.165.000	104.220.000	78.165.000,00	260.550.000,00

160		Salukonta	255.479.775	3.148.364	258.628.000	77.588.400	103.451.200	77.588.400,00	258.628.000,00
161		Mesakada	255.479.775	3.258.133	258.738.000	77.621.400	103.495.200	77.621.400,00	258.738.000,00
162		Mehalaan Barat	255.479.775	6.957.294	262.437.000	78.731.100	104.974.800	78.731.100,00	262.437.000,00
163		Saluahok	255.479.775	2.343.705	257.823.000	77.346.900	103.129.200	77.346.900,00	257.823.000,00
164		Salubalo	255.479.775	3.721.808	259.202.000	77.760.600	103.680.800	77.760.600,00	259.202.000,00
165		Passembuk	255.479.775	4.715.081	260.195.000	78.058.500	104.078.000	78.058.500,00	260.195.000,00
166		Kondo	255.479.775	4.009.588	259.489.000	77.846.700	103.795.600	77.846.700,00	259.489.000,00
167		Leko Sukamaju	255.479.775	2.482.456	257.962.000	77.388.600	103.184.800	77.388.600,00	257.962.000,00
168		Ulumea	255.479.775	3.291.642	258.771.000	77.631.300	103.508.400	77.631.300,00	258.771.000,00
Total			42.920.602.144	875.930.656	43.796.532.800	13.138.959.840	17.518.613.120	13.138.959.840	43.796.532.800,00

BUPATI MAMASA,

ttd

WELEM SAMBOLANGI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
Plt. KABAG. HUKUM,
YALRY, SH
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. : 19780120 201101 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DESA DI
KABUPATEN MAMASA

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	RASIO INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MAMBI	RANTEBULAHAN	43	0,0053331
2		SONDONGLAYU	40	0,0050132
3		SALUBANUA	51	0,0063582
4		TAPALINA	42	0,0052265
5		SENDANA	42	0,0051884
6		PAMOSEAN	56	0,0069639
7		SELUMAKA	45	0,0055427
8		BUJUNG MANURUNG	47	0,0058119
9		SALU ALO	44	0,0054853
10		INDOBANUA	55	0,0068248
11		SALUDURIAN	43	0,0053888
12	ARALLE	RALLE ANAK	38	0,0046917
13		PANETEAN	54	0,0067088
14		UHAILANU	41	0,0050333
15		ARALLE UTARA	52	0,0064290
16		UHAIDAHO	41	0,0050930
17		BARURU	72	0,0089347
18		RALLEANAK UTARA	44	0,0054226
19		PAMOSEANG PANGGA	46	0,0057363
20		KALABE	51	0,0063360
21		ARALLE SELATAN	53	0,0065363
22		HAHANGAN	58	0,0071666
23	MAMASA	RAMBUSARATU	48	0,0059910
24		OSANGO	27	0,0033045
25		LAMBANAN	36	0,0044956
26		LEMBANA SALULO	40	0,0050274
27		TAUPE	39	0,0047866
28		BUNTU BUDA	20	0,0025358
29		TONDOK BAKARU	49	0,0060889
30		PEBASSIAN	46	0,0056875
31		MAMBULILING	42	0,0051962
32		BOMBONG LAMBE	35	0,0043833
33		BUBUN BATU	52	0,0064217
34	PANA	MANIPI	51	0,0063013
35		MAMULLU	49	0,0061312
36		SAPAN	52	0,0065176
37		DATUBARINGAN	51	0,0062768
38		PANURA	54	0,0066791
39		TALLANG BULAWAN	55	0,0067725
40		KARAKA	53	0,0066399
41		ULUSALU	48	0,0059089
42		WERI	55	0,0068252
43		SALUTAMBUN	58	0,0071826
44		SALOAN	51	0,0063272

45		ULUSALU INDAH	55	0,0068208
46	TABULAHAN	PERIANGAN	66	0,0082034
47		MALATIRO	42	0,0052343
48		TABULAHAN	46	0,0056538
49		SALULEANG	49	0,0061374
50		TAMPAK KURRA	43	0,0053924
51		GANDANG DEWATA	51	0,0063272
52		BURANA	46	0,0056589
53		SALUBAKKA	45	0,0055808
54		PANGANDARAN	45	0,0055882
55		TALOPAK	66	0,0081707
56		PEU'	68	0,0084791
57		TIMORO	60	0,0074257
58		LAKAHANG UTAMA	43	0,0053922
59	SUMARORONG	BATANG URU	43	0,0053226
60		SASAKAN	42	0,0052184
61		TADISI	58	0,0072158
62		SIBANAWA	42	0,0051867
63		BATANGNGURU TIMUR	42	0,0051632
64		SALUBALO	60	0,0074434
65		BANEA	42	0,0052708
66		RANTE KAMASE	48	0,0059388
67	MESSAWA	RIPPUNG	37	0,0046483
68		MAKUANG	37	0,0046183
69		SEPANG	60	0,0074469
70		MALIMBONG	55	0,0068140
71		MATANDE	33	0,0041349
72		SIPAI	43	0,0053886
73		PASMA MAMBU	41	0,0051016
74		TANETE BATU	39	0,0048767
75	SESENAPADANG	OROBUA	36	0,0045315
76		PALADAN	48	0,0060047
77		OROBUA TIMUR	41	0,0050713
78		RANTE PUANG	40	0,0050077
79		SATENETEAN	62	0,0077033
80		LISUAN ADA	60	0,0074724
81		OROBUA SELATAN	44	0,0054316
82		MALANGKENA PADANG	46	0,0057681
83		MALIMBONG	47	0,0058640
84		MARAMPAN OROBUA	62	0,0076702
85	TANDUK KALUA	MALABO	45	0,0055528
86		SINDAGAMANIK	36	0,0044887
87		PARONDOBULAWAN	58	0,0071979
88		TAMALANTIK	40	0,0049460
89		MANNABABA	43	0,0053503
90		MESAKADA	42	0,0052750
91		BALLABATU	48	0,0059129
92		PAMBE	38	0,0046775
93		SALURANO	42	0,0052518
94		TALIMBUNG	46	0,0057705
95		KANAN	61	0,0075341
96	TABANG	TADOKALUA	48	0,0060199
97		TABANG BARAT	51	0,0063643
98		MASUPU	50	0,0062719
99		KALAMA	52	0,0065062

100		BAKADISURA	53	0,0065478
101		SALUKONA	69	0,0085651
102	BAMBANG	MOKALLANG	46	0,0056984
103		MASOSO	47	0,0058448
104		SALUASSING	41	0,0051497
105		SALUBULO	60	0,0074503
106		SALUKADI	47	0,0057979
107		SALUKEPOPOK	42	0,0051737
108		ULUMAMBI BARAT	46	0,0057513
109		LIMBADEBATA	51	0,0063246
110		TANETE TOMBA	62	0,0077085
111		BAMBANG	36	0,0044582
112		RANTELEMO	59	0,0073019
113		SALUDENGEN	45	0,0055427
114		ULUMAMBI	58	0,0071623
115		BAMBANG TIMUR	41	0,0051406
116		MINANGA	39	0,0048763
117		SIKAMASE	66	0,0081602
118		RANTETARIMA	48	0,0059053
119		SALURURU	50	0,0061499
120		SALUTABANG	60	0,0075035
121		BALATANA	50	0,0062142
122	BALLA	BALLA	26	0,0032737
123		BALLA BARAT	53	0,0065232
124		BALLA SATANETEAN	42	0,0052723
125		BALLA TUMUKA	44	0,0054899
126		SEPAKUAN	36	0,0044129
127		PIDARA	40	0,0049715
128		BAMBAPUANG	53	0,0066436
129		BALLA TIMUR	56	0,0069520
130	NOSU	MINANGA	38	0,0046850
131		BATUPAPAN	54	0,0067195
132		MASEWWE	43	0,0052834
133		SIWI	54	0,0067548
134		MINANGA TIMUR	38	0,0046685
135		PARINDING	45	0,0056375
136	TAWALIAN	TAWALIAN TIMUR	37	0,0046225
137		KARIANGO	37	0,0046285
138		RANTETANGNGA	50	0,0061873
139	RANTEBULAHAN TIMUR	SALUMOKANAN	36	0,0044195
140		SALUMOKANAN BARAT	45	0,0055859
141		BUANGIN	47	0,0058791
142		BAMBANG BUDA	54	0,0067301
143		LEKO	47	0,0058116
144		KIRAK	62	0,0076963
145		SALUMOKANAN UTARA	47	0,0058895
146		SAMPALE	50	0,0062425
147	BUNTUMALANGKA	BUNTUMALANGKA	36	0,0044522
148		RANTEBERAN	42	0,0052141
149		KEBANGA	43	0,0053066
150		SALURINDU	39	0,0047968
151		TAORA	48	0,0059084
152		KABAE	46	0,0056537
153		SALUTAMBUN BARAT	41	0,0050918
154		PENATANGAN	44	0,0055025

155		SALUTAMBUN TIMUR	46	0,0057376
156		SALUTAMBUN	41	0,0051451
157		ARALLE TIMUR	46	0,0057421
158	MEHALAAN	MEHALAAN	42	0,0052483
159		BOTTENG	70	0,0086873
160		SALUKONTA	45	0,0055844
161		MESAKADA	47	0,0058734
162		MEHALAAN BARAT	67	0,0083372
163		SALUAHOK	41	0,0050726
164		SALUBALO	68	0,0084321
165		PASSEMBUK	63	0,0077770
166		KONDO	69	0,0086181
167		LEKO SUKAMAJU	47	0,0057976
168		ULUMEA	68	0,0084088
Total			8.050	1,00

BUPATI MAMASA,

ttd

WELEM SAMBOLANGI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
Plt. KABAG. HUKUM,
VALENTIN SH
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19780120 201101 1 002



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA JABATAN	PENGHASILAN TETAP		TUNJANGAN	JUMLAH
		VOLUME	SATUAN		
1.	KEPALA DESA	1 Orang/Bulan	Rp. 2.200.000,00	Rp. 800.000,00	Rp. 3.000.000,00
2.	SEKRETARIS DESA	1 Orang/Bulan	Rp. 1.616.700,00	Rp. 500.000,00	Rp. 2.116.700,00
3.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN	1 Orang/Bulan	Rp. 1.166.000,00		Rp. 1.166.000,00
4.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	1 Orang/Bulan	Rp. 1.166.000,00		Rp. 1.166.000,00
5.	KEPALA SEKSI PELAYANAN	1 Orang/Bulan	Rp. 1.166.000,00		Rp. 1.166.000,00
6.	KEPALA URUSAN KEUANGAN	1 Orang/Bulan	Rp. 1.166.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. 1.416.000,00
7.	KEPALA URUSAN PERENCANAAN	1 Orang/Bulan	Rp. 1.166.000,00		Rp. 1.166.000,00
8.	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM	1 Orang/Bulan	Rp. 1.166.000,00		Rp. 1.166.000,00
9.	KEPALA DUSUN	4 Orang/Bulan	Rp. 1.166.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. 5.664.000,00

10.	KETUA BPD	1 Orang/Bulan		Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
11.	WAKIL KETUA BPD	1 Orang/Bulan		Rp. 650.000,00	Rp. 650.000,00
12.	SEKRETARIS BPD	1 Orang/Bulan		Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00
13	ANGGOTA BPD	2 Orang/Bulan		Rp. 400.000,00	Rp. 800.000,00

BUPATI MAMASA,

ttd

WELEM SAMBOLANGI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
Plt. KABAG. HUKUM
YAURY, SH
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. : 19780120 201101 1 002